



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABUN BUNYAMIN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 19196

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.395.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/100 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/175 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 193.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOBIL, GRAND LIVINA VL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 23.756.912

F. HARTA LAINNYA Rp. 120.000.000

Sub Total Rp. 1.731.756.912

III. HUTANG Rp. 720.574.402

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.011.182.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.